

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota semuanya memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir periode anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan penganggaran sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penilaian untuk mengukur suatu tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan otonominya yang dinilai melalui laporan pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri dapat digunakan untuk membantu meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.² Adapun analisis rasio keuangan pemerintah daerah meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman

² Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan permungutan pendapatan Asli Daerah.³

Hasil penelitian Purba, dkk menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir jika dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang belum cukup baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan.⁴ Penelitian Siswanto dan Maylani menemukan hasil sebaliknya bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang jika dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik, efektif dan efisien.⁵ Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Yousida,⁶ artinya kinerja keuangan Pemerintah Daerah

³ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hal. 140—141.

⁴ Sahala Purba et al., “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 5.1 (2024), hal. 67—80

⁵ Siswanto dan Dita Asri Maylani, “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11.1 (2022), hal. 130—138

⁶ Ifrita Indah Sari dan Imawati Yousida, “Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5.1 (2019), hal. 129—142

Kabupaten Tanah Bumbu jika dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Tulungagung terdiri atas 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri serta untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik. Alasan lain peneliti melakukan penelitian tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung karena penelitian ini masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Analisis**

Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung (Studi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang utama masih belum mampu menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah masih bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat yang bisa dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat.
3. Kemampuan pemerintah daerah yang masih rendah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah yang terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi ?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio efektifitas PAD ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio efisiensi PAD ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi.
2. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah.
3. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
4. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio efektifitas PAD.
5. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari rasio efisiensi PAD.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi keilmuan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi peneliti yang minat dibidang serupa untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup selalu dibutuhkan dalam penelitian agar penelitian dapat fokus pada yang diteliti saja, sehingga pembahasannya tidak keluar dari topik penelitian. Penelitian ini akan terfokuskan pada kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikatnya dengan lima variabel bebas yang digunakan untuk mengukurnya. Variabel bebasnya yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi PAD.

Terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu pembuatan penelitian karena hanya mampu menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Keterbatasan waktu penelitian karena peneliti hanya menggunakan periode dalam kegiatan analisisnya yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami istilah yang ada dalam judul penelitian.

Penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁷

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah

⁷ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawalin, 1986), hal. 199.

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

e. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektivitas PAD adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

f. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.⁸

2. Definisi operasional

Definisi Operasional merupakan definisi yang menjelaskan secara operasional mengenai istilah atau variabel yang digunakan dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan efisiensi PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

⁸ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2019, hal.140—142

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dibuat untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika skripsi ini menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari enam bagian dengan penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjadikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan tentang deskripsi teori mengenai akuntansi pemerintah, analisis laporan keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah. Beserta pembahasan terkait hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan paparan data serta hasil pengukuran dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis yang telah dilakukan dan hubungan antara penelitian dengan teori maupun studi empiris yang dilakukan peneliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil hasil penelitian secara menyeluruh serta berisi saran untuk kedepannya.